

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana Peran Pemerintah Desa Batu Tunggul Labuhanbatu Utara Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mendapatkan Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan hasil analisis data wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan yang berkaitan dengan peran pemerintah Desa Batu Tunggul Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pengembangan desa wisata untuk memperoleh pendapatan hasil desa yang dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Wawancara Dengan Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Indra Sugiarto,SH	Kepala Desa Batu Tunggul
2	Herdaman Munthe	Pengelola Tempat Wisata
3	Sri	Pengelola Tempat Wisata
4	Eko	Pengelola Tempat Wisata
5	Hendra Simamora	Masyarakat Desa
6	Amran Lelono	Masyarakat Desa
7	Ajiz Rambe	Pengunjung Wisata
8	Rendi Shareza	Pengunjung Wisata
9	Ari Muspiin,S.Pd	Sekretaris Desa
10	Ali Nadi	Pengunjung Wisata
11	Harni Simatupang	Pengunjung Wisata

Pemerintah Desa Batu Tunggul diidentifikasi memiliki beberapa peran. Yakni sebagai fasilitator dan regulator. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bapak Indra Sugiharto,SH sebagai Kepala Desa Batu Tunggal

Pemerintahan berperan penting dalam pengembangan objek wisata alam Aek Buru di wilayah Labuhanbatu Utara. Dalam hal ini, Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun infrastruktur, seperti penyediaan infrastruktur seperti toilet dan ruang ganti dan masalah untuk Objek wisata alam Aek Buru di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari hasil wawancara kepada Bapak Indra Sugiharto :

“Dalam kaitannya dengan pembangunan, Pemerintah Desa meningkatkan pembangunan fisik, misalnya pembangunan sarana prasarana seperti toilet, ruang ganti dan tempat ibadah juga meningkatkan daya tarik wisata dengan penyediaan fasilitas tersebut dilokasi wisata alam Aek Buruh (dalam arti tahap perencanaan)”. (Resp. 1)

Berdasarkan hasil wawancara dengan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada wisata Aek Buru, upaya yang dilakukan pemerintah pertama adalah memberikan fasilitas kepada pengunjung, adapun fasilitas yang telah dibangun diantaranya adalah, toilet umum yang disebar di beberapa titik lokasi wisata, selain toilet umum, fasilitas lainnya yang terlihat adalah ruang ganti. Fasilitas lainnya yang telah dipnuhi adalah dengan menyediakan tempat ibadah berbentuk Mushola. Penyediaan fasilitas ini ditandai sebagai

salah satu upaya yang dianggap mampu menarik minat pengunjung untuk memilih Aek Buru sebagai tempat wisata yang disenangi oleh pengunjung.

Sama halnya dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengatakan bahwa pengelolaan pariwisata tidak lepas dari komitmen masyarakat dan pengelola objek wisata itu sendiri, karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan pariwisata. kualitas pariwisata memerlukan kerjasama dan partisipasi aktif antara pemerintah, masyarakat dan pengelola objek wisata dalam wawancara berikut:

“Kami sangat bangga dengan masyarakat dan pengelola objek wisata Aek Buru Desa Batu Tunggal Kabupaten Labuhanbatu Utara ini, khususnya objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan karena ingin membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek wisata tanpa ada keterlibatan langsung para pihak. Demikian pula dalam mengelola objek wisata tanpa menunggu bantuan atau memberikan dana dari Pemerintah, berupaya melengkapi sarana dan prasarana kebersihan dari tujuan wisata”
(Resp.1)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat bangga dengan masyarakat sekitar tempat wisata alam Aek Buru, karena tanpa ada perintah langsung dari Pemerintah, masyarakat tetap menjaga kelestarian alam Aek Buru. Partisipasi aktif masyarakat, pengelola objek wisata dan

Dinas Olahraga dan Pariwisata Pemuda Labuhanbatu Utara harus dilaksanakan mengingat banyaknya objek wisata di Labuhanbatu Utara dan tidak semuanya dapat dikelola oleh satu pihak saja. Meskipun Dinas Olahraga dan Pariwisata Pemuda Labuhanbatu Utara merupakan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara. Paling tidak yang bisa dilakukan pemerintah adalah menjaga kebersihan dan meningkatkan pembangunan fasilitas untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan membangun fasilitas pompa air, merencanakan fasilitas keamanan di kawasan wisata tersebut agar para wisatawan juga dapat menikmatinya dengan nyaman dan aman.

2. Bapak Herdaman Sebagai Pengelola Desa Wisata

Pengelola objek wisata tidak hanya berupaya melestarikan masyarakat sekitar objek wisata, tetapi juga melestarikan objek wisata tersebut, Peran Pemerintah Desa Batu Tunggal juga ditunjukkan dengan beberapa fasilitas yang telah diberikat, dalam hal ini Bapak Herdaman selaku pengelola desa wisata juga mengkonfirmasi dengan pernyataan sebagai berikut:

“Dalam wisata alam Aek Buru ini kami telah berusaha untuk melengkapi fasilitas kamar mandi ataupun ruang ganti. Kami mengorganisir kerja bakti seminggu sekali di tempat wisata alam Aek Buru ini agar wisatawan tidak terganggu dengan situasi objek

wisata yang kotor sehingga wisatawan merasa nyaman dan ingin datang ke tempat wisata ini” (Resp. 2)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola ataupun masyarakat berusaha untuk melengkapi fasilitas kebersihan seperti alat pembersih dan tempat sampah yang sangat mendukung bahwa masyarakat sangat peduli terhadap wisata alam Aek Buru dan Masyarakat sekitar. Pengelola Objek wisata alam Aek Buru juga mengadakan bakti sosial untuk membersihkan dan menata tempat wisata agar wisatawan atau pengunjung dapat menikmati pemandangan alam Aek Buru.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Herdaman sebagai Pengelola Desa Wisata Aek Buru menyebutkan bahwa.

“Aek Buru ini di promosikan melalui baru pakai sistem manual dari mulut ke mulut, kalau pun ada baru iklan baliho yang dipasang di jalan” (Resp. 2)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penyelenggaraan promosi Objek Wisata masih menggunakan sistem tradisional, yakni promosi dari mulut ke mulut. Selebihnya promosi juga dilakukan dengan memasang baliho di titik Daerah Wisata. Namun promosi lainnya juga terlihat dari beberapa akun Instagram atau Facebook yang dibuat oleh pihak ketiga tentang wisata di wilayah

Labuhanbatu Utara yang ini juga termasuk dalam bentuk promosi pengembangan Desa Wisata.

Jumlah informasi yang diberikan melalui media saat ini masih sebatas untuk mempromosikan dan memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara khususnya Aek Buru. dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Labuhanbatu Utara, kurangnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi, misalnya tidak digunakannya video untuk mempromosikan pariwisata, disebabkan kurangnya penerapan teknologi informasi inovasi yang diwaspadai.

Keuntungan menggunakan Internet adalah ketersediaannya 24 jam tanpa mengenal lelah dan sebagai jaminan privasi. Fungsi mesin pencari dan direktori Internet membuat pencarian informasi menjadi sangat cepat dan mudah. Berkat banyaknya layanan, informasi khususnya tentang pariwisata dengan sendirinya dapat diperoleh dan disebarluaskan dengan sangat cepat dibandingkan dengan mencari informasi dari media cetak atau dari mulut ke mulut. Tentunya hal ini dimungkinkan jika terdapat informasi yang tertata dan terstruktur dengan baik tentang produk wisata, karena internet hanyalah sarana komunikasi.

Selain menjadi media penyedia informasi, juga dapat memfasilitasi interaksi wisatawan dengan tour operator pilihannya. Namun, hingga saat ini, hanya sedikit operator pariwisata yang menggunakan Internet untuk melayani pelanggan mereka. Keberadaan

teknologi informasi banyak memberikan andil dalam produksi informasi untuk kepentingan pemerintahan mudah digunakan dimana saja. Karena memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menerima informasi tentang wisata yang baik tujuan melalui Internet.

Terwujudnya desa Wisata Aek Buru Desa Batu Tunggal ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh pemilik tanah yakni PT. ASDA melalui pemberian izin kepada masyarakat untuk mengelola wisata disekitaran lokasi tanah milik PT. ASDA. Namun ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh pengelola desa wisata, salah satunya adalah wisata hanya boleh dilakukan pada hari-hari tertentu yakni hari minggu dan hari Libur Nasional. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Herdaman selaku pengelola :

“kalau tanah ini yang punya PT.ASDA, mereka memberikan izin untuk dikelola sebagai desa wisata, dan kami berterimakasih akan hal itu”. (Resp. 2)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, selain pemerintah, ada pihak ketiga juga yang ikut andil dalam pengembangan desa wisata yakni PT. ASDA sebagai pemilik lahan. Keterlibatan PT.ASDA dalam pengelolaan desa wisata ini memeberikan peran tersendiri bagi pengelola desa wisata yakni mempermudah jalannya transaksi bisnis yang dihasilkan dari pengembangan desa wisata.

3. Ibu Sri Sebagai Pengelola Desa Wisata

Hasil wawancara kepada narasumber lain yakni Ibu Sri sebagai pengelola Desa Wisata Aek Buruh Desa Batu Tunggul Kabupaten Labuhanbatu Utara juga menyebutkan bahwa:

“kalau fasilitas sekarang ini, yang baru ada mushola, beberapa penjual makanan dan area parkir yang cukup luas buat pengunjung” (Resp. 3)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya bangunan tersebut, wisata alam Aek Buru menjadi salah satu tempat wisata favorit warga Labuhanbatu Utara terutama pada saat liburan sekolah. Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Objek wisata alam di Aek Buru dinilai memiliki potensi besar dan belum sepenuhnya terungkap.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, kawasan wisata ini memiliki daya tarik menjadi daerah tujuan wisata. Kabupaten Labuhanbatu Utara menawarkan potensi Objek wisata alam, budaya, dan kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Posisi industri pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat penting sebagai salah satu kegiatan utama Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu perhatian Pemerintah terhadap pengembangan pariwisata semakin meningkat dan pengembangan pariwisata menjadi fokus pembangunan Desa.

4. Bapak Eko Sebagai Pengelola Desa Wisata

Hasil penelitian ini juga menkonfirmasi pendapat dari narasumber lainnya, yakni Bapak Eko sebagai pengelola tempat Wisata Aek Buruh Desa Batu Tunggal yakni:

“fasilitas yang diberikan pemerintah sejauh ini ya akses jalan, beberapa titik sudah dibenahi, kemudian mushola ditempat wisata” (Resp.4)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa cukup memiliki peran dalam pengembangan desa wisata khususnya pada tempat wisata Aek Buru Desa Batu Tunggal. Penyediaan fasilitas sebagai bentuk sarana prasarana yang dapat dinikmati oleh pengunjung ditandai sebagai salah satu bentuk peran yang ditunjukkan oleh desa, selain itu fasilitas ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata. Keberhasilan desa wisata juga dapat ditunjukkan dengan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yakni selain masyarakat itu sendiri pemerintah juga memiliki andil yang cukup besar. Selanjutnya Bapak Eko juga menyebutkan bahwa:

“sejauh ini, saya menganggap pemerintah desa cukup memberikan perannya sebagai pemerintah, salah satu bentuk perhatian yang diperlihatkan adalah penerapan regulasi serta pemenuhan fasilitas pada objek wisata aek buruh” (Resp. 4)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pengelola desa wisata merasa pemerintah berperan aktif dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini ditandai sebagai satu langkah penting dalam keberhasilan objek wisata. Artinya semakin tinggi peran dan dukungan pemerintah dalam pengembangan desa wisata maka semakin tinggi tingkat keberhasilan dari objek wisata itu sendiri.

5. Bapak Hendra Simamora Sebagai Masyarakat Desa Batu Tunggal

Peran pemerintah Desa Batu Tunggal dalam pengembangan objek Wisata Aek Buruh juga ditunjukkan melalui pernyataan yang diberikan oleh Bapak Hendra selaku masyarakat Desa Batu Tunggal yang menyebutkan:

“perannya ada, salah satunya pembenahan jalan, kalau yang lain mungkin bisa kita tengok fasilitas kayak mushola atau tempat ganti buat pengunjung” (resp. 5)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat menganggap pemerintah Desa Batu Tunggal memiliki peran yakni pemenuhan fasilitas objek wisata yang ditunjukkan melalui pembenahan jalanan menuju objek wisata. Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitas umum seperti mushola dan fasilitas lainnya. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber lainnya. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa pembenahan jalan menuju objek wisata ditandai sebagai salah satu upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam menarik minat pengunjung untuk berkunjung di objek wisata Aek Buru.

Narasumber juga mengatakan bahwa masyarakat sangat mendukung pengelolaan Objek Wisata Alam Aek Buru untuk ikut berpartisipasi, seperti menjaga kebersihan, pemeliharaan dan mencari alternatif pemecahan masalah, serta partisipasi masyarakat dalam proses evakuasi perubahan.

“Kami bangga banyak yang mengetahui tempat wisata alam Aek Buru ini, jadi sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar wisata ini upayakan menjaga kelestarian dan kebersihan dalam perjalanan menuju objek wisata, agar wisatawan tidak terganggu dengan pemandangan yang kotor”. (Resp. 5).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa wisata alam Aek Buru sudah banyak dikenal oleh Masyarakat Daerah Labubantu Utara maupun dari luar Daerah sehingga masyarakat bangga dan berusaha menjaga kelestarian dan kebersihannya. Pengelola objek wisata tidak hanya berupaya melestarikan masyarakat sekitar objek wisata, tetapi juga melestarikan objek wisata tersebut.

6. Bapak Amran Lelono Sebagai Masyarakat Desa

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Amran selaku masyarakat Desa Batu Tunggal menyebutkan bahwa:

“ada, perannya kalau kita lihat ya itu salah satunya benahin jalan yang rusak ke arah tempat wisata, trus ada juga fasilitas umum yang dibangun pemerintah”.(Resp. 6).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat menganggap bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan desa wisata. Hal ini ditunjukkan dengan terlibatnya pemerintah dalam pemenuhan fasilitas wisata, contohnya adalah pembenahan jalan, selain itu pembangunan fasilitas sebagai bentuk sarana dan prasarana umum yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Peran ini juga menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam optimalisasi perannya sebagai fasilitator objek wisata.

Program pengelolaan Objek wisata alam sangat penting untuk meningkatkan kualitas Objek wisata dan meningkatkan jumlah pengunjung Objek wisata tersebut. Namun berkat Objek wisata ini, masyarakat setempat memiliki banyak peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Seperti yang diungkapkan masyarakat setempat Bapak Amran Lelono yang menyebutkan bahwa:

“pada setiap hari libur masyarakat sekitar objek wisata alam Aek Buru menjual minuman dan makanan ringan kepada pengunjung”
(Resp.6).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, objek wisata alam Aek Buru memungkinkan masyarakat sekitar objek wisata untuk membuka usaha

penjualan minuman dan makanan ringan kepada pengunjung. Hal ini sangat menguntungkan bagi lingkungan Objek wisata alam Aek Buru karena memiliki peluang untuk memulai usaha walaupun sederhana. Selain itu, pengelola juga sangat bangga atas kerja sama yang baik dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lokasi Objek wisata. Masyarakat berharap pemerintah lebih memperhatikan objek wisata alam Aek Buru, dalam hal ini jalan menuju Objek wisata, agar jalan tersebut dapat segera diperbaiki. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif memperbaiki jalan menuju Objek wisata alam Aek Buru.

7. Bapak Ajiz Rambe dan Rendi Shareza Sebagai Pengunjung

Penelitian ini juga mengkonfirmasi peran pemerintah kepada pengunjung objek wisata Aek Buru yang menyebutkan bahwa:

“saya tidak tau, kalua fasilitas ditempat wisata ada, kayak mushola sama tempat parkir yang luas. Cuman kalua jalan masih buruk”

(Resp 7)

Hal ini seada dengan yang disebutkan oleh Bapak Rendi yang menyebutkan bahwa”

“kalua fasilitas yang tau itu toilet umum, tempat istirahat sama tempat jualan-jualan, kalua jalanan masih jelek kalua ujan sih pasti licin itu”.(Resp 8)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pemerintah dianggap cukup, pengunjung mengkonfirmasi belum

merasakan fasilitas jalanan yang cukup baik dalam menuju lokasi wisata. Namun peran lain ditunjukkan melalui pemenuhan fasilitas sarana umum yang dapat dirasakan oleh pengunjung. Pernyataan ini dianggap sebagai salah satu masukan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat memberikan perhatian pada kondisi jalanan menuju lokasi wisata. Sekaligus menjadi catatan yang cukup penting bagi pengelola untuk memberikan fasilitas lainnya seperti plangisasi atau penunjuk arah bagi pengunjung.

Potensi kawasan wisata alam Aek Buru sangat mendukung keberadaan objek wisata Aek Buru sebagai objek wisata di kawasan Labuhanbatu Utara. Keindahan alam yang tercermin dari rindangnya pepohonan dan kesejukan udara di sekitar objek wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari hasil wawancara dengan pengunjung objek wisata alam Aek Buru Bapak Ali, mengatakan bahwa:

"Wisata alam Aek Buru memiliki air sungai yang sejuk dan juga terdapat pemandangan yang masih alami, sehingga sangat cocok untuk liburan bersama keluarga atau teman. (Resp.10)

Hal senada juga disebutkan oleh pengunjung lainnya Ibu Harni yang menyebutkan bahwa:

"ya kalau di Labuhanbatu ini kan gak banyak, Aek Buru ini udah termasuk paten kali, airnya jernih , bersih, hijau juga, enak ditengok". (Resp. 11)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kita dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah di wisata alam Aek Buru. Alam yang masih asli dan indah didukung dengan suasana alam yang asri memberikan udara sejuk dan bersih yang membuat nyaman pengunjung dan suasana air sungai yang masih alami membuat pengunjung merasa betah dan nyaman. Selain air sungai, Aek Buru memiliki pemandangan alam yang masih alami sehingga objek wisata alam Aek Buru memiliki pesona alam yang indah.

8. Bapak Ari Muspiin,S.Pd Sebagai Sekretaris Desa

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Ari Muspiin,S.Pd terkait peran pemerintah Desa Batu Tunggal dalam pengembangan desa wisata untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah”

“kami mengupayakan apa yang dibutuhkan oleh oleh pengelola desa wisata, misalnya pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, misalnya pembangunan toilet umum, rest area atau perbaikan jalan menuju lokasi wisata”. (Resp.9)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan oleh pengelola objek wisata dalam mengembangkan desa wisata, misalnya pembenahan jalan menuju lokasi wisata, selain itu pemenuhan fasilitas umum lainnya seperti pembangunan toilet umum dan rest area. Seluruh rangkaian upaya

ini ditandai sebagai salah satu bentuk peran pemerintah yang secara aktif mendukung pengembangan desa wisata di kawasan Desa Batu Tunggul.

Kemudian Bapak Ari Muspiin, S.Pd selaku Pemerintah Desa Batu Tunggul juga menyebutkan bahwa:

“Kalau soal tanah dan pengelolaan desa wisata disini, untuk yang Aek Buru itu miliknya PT, cuma mereka memberikan izin kepada Pemerintah Desa untuk mengelola desa wisata yang kemudian Pemerintah menyerahkan kepada tokoh masyarakat setempat”.
(Resp. 9)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, peran perusahaan pemilik tanah memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada Pemerintah Desa Batu Tunggul khususnya kepada masyarakat. Dengan diberikan izin untuk penggunaan tanah sebagai tempat wisata, maka secara langsung PT. ASDA membuka peluang pemasukan kepada desa dana masyarakat setempat. Dengan demikian ini dikatakan sebagai faktor pendukung berdirinya desa wisata Aek Buru di Desa batu Tunggul.

Hasil penelitian ini juga menemukan peran lain yang diberikan oleh pemerintah Desa Batu Tunggul dalam pengelolaan Desa Wisata Aek Buru yakni sebagai berikut:

a. Regulasi/Aturan Retribusi Karcis/Tiket Pengunjung

Retribusi adalah pungutan atau ongkos yang dipungut oleh provinsi berdasarkan aturan yang ditetapkan provinsi, yang merupakan pendapatan atau pungutan daerah yang dibayarkan atau digunakan untuk penerimaan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa desa wisata Aek Buru di Desa Batu Tunggal hingga saat ini belum menerapkan sistem retribusi dan pengunjung hanya dikenakan untuk pembayaran parkir. Hal ini disebutkan oleh pengelola Bapak Herdaman Munte :

"Pengunjung yang datang di Aek Buru dikenakan 5.000/orang hanya untuk parkir, kalau retribusi itu belum ada" (Resp.2)

Hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu pengunjung yakni Bapak Aziz Rambe yang menyebutkan bahwa:

"gak ada, gak dipungut apapun, cuman biaya parkir aja 5.000" (Res.7)

Kemudian pengunjung lainnya Bapak Rendi juga menyebutkan bahwa:

" saya sama kawan-kawan tadi cuman bayar parkir aja bang, gak diminta uang karcis". (Resp. 8)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa setiap masyarakat/pengunjung yang datang ke objek wisata alam Aek Buru belum dikenakan kewajiban untuk membayar retribusi. Hal ini menjadi

salah satu faktor yang menyebabkan Pemerintah Desa belum memperoleh Pendapatan Asli Desa. Dalam hal ini, penelitian ini merekomendasikan bahwa sesuai dengan potensi wisata dan antusiasme masyarakat untuk berkunjung di Desa Wisata Aek Buru sudah sepatutnya pemerintah memberlakukan regulasi pemungutan uang retribusi, dengan tujuan uang retribusi dapat diajihkan sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa yang kemudian dapat digunakan untuk memngembangkan berbagai sektor wisata unggulan lainnya di Desa Batu Tunggal.

b. Aturan Retribusi Parkir

Terdapat tempat parkir yang luas pada objek wisata Alam Aek Buru, dan pengunjung yang datang menggunakan mobil atau motor harus membayar biaya parkir. Mengenai hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Bapak Indra Sugiharto,SH yang menyebutkan bahwa:

"Pengunjung dengan sepeda motor atau mobil akan membayar biaya parkir sebesar Rp 3.000 untuk sepeda motor dan Rp 5.000 untuk mobil. Keseluruhan pendaatan parkir pendapatannya diserahkan kesleruhan kepada masyarakat setempat" (Resp.1)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa di Aek Buru biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung berupa biaya parkir dan pengelola objek wisata Aek Buru sendiri bertanggung jawab atas hal tersebut dan pendapatannya digunakan untuk pengembangan objek wisata

alam Aek Buru itu sendiri. Hal ini senada dengan hasil wawancara kepada Pengelola objek wisata alam Aek Buru Bapak Herdaman :

"iya, pemerintah ngasih ke masyarakat sepenuhnya, jadi pengelolaan parkir kita kelola sendiri, pemasukannya sebagian buat kita sebagai juga untuk pengembangan desa wisata, dan kami berterimakasih akan itu kepada Pemerintah Desa. (Resp. 2)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pengelola wisata alam Aek Buru yang merupakan Masyarakat setempat Desa Batu Tunggal sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga parkir di wisata Aek Buru, karena dengan kepercayaan tersebut masyarakat Aek Buru dapat menambah pendapatan tambahan dan harapan bahwa manajemen akan terus menawarkan biaya parkir kepada Masyarakat di Aek Buru di masa mendatang.

c. Aturan Membawa Senjata Tajam dan Obat Terlarang

Objek Wisata Alam Aek Buru merupakan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, pengunjung Situs Wisata Alam Aek Buru Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak diperkenankan membawa benda tajam dan obat-obatan. Terkait hasil wawancara tersebut, Kepala Pemerintahan Desa Bapak Indra mengatakan bahwa:

“Pengunjung wisata alam Aek Buru tidak boleh membawa senjata tajam atau obat-obatan terlarang (seperti minuman keras ataupun narkoba)” (Resp.1)

Hal ini juga dikonfirmasi oleh pengurus desa wisata yakni Bapak Eko yang menyebutkan bahwa:

“iya kalau aturan lainnya itu, pengunjung gak boleh bawa senjata tajam, apalagi minuman keras, kami pantau terus dan kami pastikan gak akan ada pengunjung yang brani mabuk-mabukan” (Resp. 4)

Selain itu Bapak Hendra selaku Masyarakat Desa juga menyebutkan bahwa:

“ya gak boleh, 2 hari sekali kami lakukan pengawasan, biar gak ada mabuk-mabukan, pacaran atau yang nglanggar hukum”. (Resp.2)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti berkesimpulan bahwa Aek Buru saat memasuki objek wisata, pengunjung tidak boleh membawa senjata tajam, karena barang-barang tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta obat-obatan terlarang. Kita tahu bahwa penggunaan obat-obatan terlarang dihukum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu pengawasan untuk aturan ini juga dilakukan oleh masyarakat setempat, bahwa pengunjung Desa Wisata Batu Tungga dipastikan untuk tidak melakukan

hal-hal yang melanggar hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi wisata dan memastikan seluruh tempat wisata dalam kondisi steril. Sedangkan dari pengelola, aturan ini diberlakukan dengan menerapkan pemeriksaan secara ketat kepada pengunjung. Pengelola memataui melalui pintu masuk sampai dengan post-post yang terada di lokasi wisata dengan terus memastikan bahwa tidak ada perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pengunjung.

4.2 Apakah Kendala Pemerintah Desa Batu Tunggul Labuhanbatu Utara Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mendapatkan Pendapatan Asli Desa

Hasil penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Batu Tunggul dalam pengembangan Desa Wisata Aek Buruh dan hasil penelitian ini menemukan bahwa:

a. Musim

Jika terjadi musim kemarau maka akan mengurangi air sungai. Dan jika terjadi musim hujan membuat air sungai Aek Buru menjadi tinggi dan keruh. Dalam wawancara dengan pengelola, dikatakan bahwa:

“Kalau musim hujan membuat air sungai menjadi tinggi dan keruh, kalau musim kemarau air di Aek Buru jadi turun, sehingga akan terjadi surut dan pengunjung tidak dapat melakukan mandi dan

berenang yang bisa dilakukan pengunjung cuma bisa main air dan menikmati pemandangan alam saja”. (Resp. 2)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola objek wisata Aek Buru, peneliti menyimpulkan bahwa pada musim kemarau air sungai di Aek Buru menurun, namun ketika musim hujan tiba mengakibatkan air sungai naik atau tinggi dan menjadi kotor dan sangat keruh.

b. Masalah lahan

Memasuki wisata alam Aek Buru kita akan disugahi dengan dengan pemandangan indah di sekitar perjalanan Aek Buru namun sebagian dari lahan tersebut masih milik perusahaan bukan milik Pemerintah Desa. Seperti hasil wawancara dengan pengelola objek wisata alam Aek Buru mengatakan bahwa:

“Lahan yang ada di sekitar permandian alam Aek Buru masih milik PT. ASDA, ya yang ditakutkan cuman kalau izinnya dicabut, secara otomatis wisata disini langsung tutup”. (Resp.2)

Kepemilikan lahan menjadi salah satu faktor penghambat yang dirasakan oleh pengelola dalam waktu panjang, artinya kepemilikan tanah yang saat ini dimiliki oleh PT. ASDA menjadikan salah satu bentuk kekhawatiran bagi pengelola jika sewaktu-waktu izin dari pemakaiannya dicabut. Dengan demikian faktor kepemilikan lahan menjadi salah satu faktor penghambat yang dominan dirasakan oleh pengelola.

Selain kepemilikan lahan faktor eksternal juga muncul dari lingkungan masyarakat setempat misalnya limbah rumah tangga, seperti yang kita ketahui bahwa limbah rumah tangga sangat susah untuk diurai dan memakan waktu yang lama dan secara tidak langsung limbah tersebut akan merusak ekosistem dari Aek Buru. Pembangunan pemukiman masyarakat harus jauh dari cagar alam Aek Buru. Salah satu upaya pemerintah untuk mengintervensi pembangunan permukiman perkotaan adalah himbauan kepada para pemilik lahan kawasan binaan wisata alam Aek Buru, agar tidak membangun kawasan pemukiman di dekat tempat yang telah menjadi kawasan binaan wisata alam Aek Buru.

c. Promosi objek wisata yang masih kurang

Promosi wisata di kawasan Labuhanbatu Utara masih tergolong kurang efektif, hal ini terlihat dari kunjungan wisatawan ke kawasan Labuhanbatu Utara yang belum meningkat secara signifikan. Hasil wawancara dengan pemerintah desa Batu Tunggul Kabupaten Labuhanbatu mengatakan bahwa:

“Sistem promosi yang dijalankan digunakan hanya pada sosial media seperti postingan dari media facebook, instagram dan lainnya, juga menggunakan sekedarnya plang di lokasi daerah objek wisata”. (Resp. 9)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa sistem promosi yang diterapkan pengelola dan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini masih sebatas sistem media saja. Masih banyak

keterbatasan informasi yang tidak diberikan terkait objek wisata alam Aek Buruh di Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada masyarakat luas. Kabupaten Labuhanbatu Utara menawarkan banyak peluang wisata yang tidak terbebani. Potensi Kabupaten Labuhanbatu Utara ternyata belum sepenuhnya tersadap internet. Selain karena informasi yang disajikan belum mencakup seluruh potensi wisata Kabupaten Labuhanbatu Utara dan masih kurangnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi seperti tidak menggunakan video untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih merupakan kekurangan dari Pemerintah. Program promosi objek wisata sangat penting untuk meningkatkan kualitas objek wisata dan meningkatkan jumlah pengunjung objek wisata tersebut. Namun, mempromosikan objek wisata alam Aek Buru masih terbilang belum ada.

d. Keterbatasan Anggaran dalam pembangunan sarana dan prasarana

Mempromosikan objek wisata merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan perkembangan pembangunan objek wisata alam adalah masalah dana atau anggaran. Mengenai hasil wawancara dengan Pemerintah Desa yang mengatakan bahwa:

“Anggaran dana pengelolaan Aek Buru masih bergantung pada dana APBD, namun pihak telah menghentikan pembangunan dan pengembangan objek wisata alam Aek Buru karena belum ada pihak terkait atau sponsor dari sektor swasta untuk membantu” Rresp.9).

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa jika ada sumber daya keuangan maka pembangunan dapat berjalan dengan baik, namun sebaliknya jika tidak maka akan menghambat pembangunan objek wisata alam Aek Buru juga menghadapi permasalahan tersebut. Pembatasan APBD mencegah pembentukan dan pengembangan kawasan alam Aek Buru. Selain itu, tidak ada sponsor swasta yang bersedia membantu.

e. Kondisi jalan yang buruk

Tidak semua objek wisata di Labuhanbatu Utara berada di sepanjang jalan utama. Objek Alam Aek Buru jauh dari pusat kota, sehingga jalan menuju objek wisata ini masih belum bagus dan belum beraspal. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi wisatawan yang berkunjung ke wisata alam Aek Buru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengunjung, mereka sangat terganggu dengan kondisi jalan menuju objek wisata Alam Aek Buru. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut, karena akan sangat mengurangi kenyamanan dan tentunya berbahaya.

“Saya sudah berkali-kali datang ke wisata alam Aek Buru ini, tapi jalurnya masih sama seperti dulu, belum ada perbaikan. Sangat berbahaya, terutama bagi kami yang datang dengan sepeda motor, karena jalannya berbatu dan merupakan jalur perbukitan. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera memperbaikinya” (Resp. 7)

Belumnya diperbaiki jalan menuju objek wisata Aek Buru, Kepala Desa Batu Tunggal Labuhanbatu Utara mengatakan, karena kurangnya anggaran untuk memperbaiki atau pun membangun jalan menuju objek wisata tersebut, seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Kami memang mengupayakan perbaikan jalan yang rusak menuju objek-objek wisata, namun masih terkendala dengan dana yang minim. Jadi kami hanya berharap agar wisatawan atau masyarakat berhati-hati menuju objek wisata agar tidak terjadi kecelakaan jika melewati jalan yang berbatu-batu”. (Resp.1)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jalan yang belum diperbaiki menuju wisata alam Aek Buru terkendala dengan dana yang minim. Namun, pemerintah berupaya akan memperbaiki jalan menuju tempat tujuan wisata tersebut. Hal ini diupayakan agar menjadikan objek wisata Aek Buru dapat maju dan terus berkembang dan dapat ketahui oleh masyarakat luar. Sehingga menjadikan sumber pendapatan bagi pengelola dan masyarakat Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kondisi jalanan yang rusak menjadikan salah satu kendala yang dirasakan oleh pengelola, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi jalanan yang buruk terdapat di beberapa titik lokasi menuju tempat wisata. Kondisi jalanan yang rusak cukup beresiko ketika terjadinya hujan, jalanan tampak licin dan sulit

untuk dilalui. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Desa, dengan demikian Pemerintah Desa harus segera memperhatikan kondisi jalanan, semakin baik kondisi jalan maka akan semakin memudahkan pengunjung untuk ke lokasi, dengan demikian, jalan yang baik akan berpengaruh langsung terhadap niat pengunjung untuk berkunjung ke desa wisata.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini menemukan beberapa temuan, penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah Desa Batu Tunggal dalam pengembangan desa wisata untuk mendapatkan penambahan pendapatan asli desa terbagi kedalam beberapa bagian. Pertama peran pemerintah desa sebagai fasilitator. Pemerintah Desa Batu Tunggal dalam perannya sebagai fasilitator melakukan beberapa pemenuhan fasilitas desa wisata, yakni dengan memberikan akses jalan, kemudian penyediaan fasilitas toilet, mushola dan tempat istirahat untuk pengunjung. Peran pemerintah sebagai fasilitator juga ditunjukkan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, yakni dengan memberdayakan masyarakat untuk berjualan di daerah lokasi wisata, hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pemerintah Desa Batu Tunggal memiliki peran sebagai regulator, pertama ditunjukkan dengan regulasi yang diberlakukan kepada pengelola wisata yakni dengan memebrikan batasan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam dan obat terlarang, regulasi lainnya juga ditunjukkan melalui kebijakan kebebasan pemungutan parkir kepada pengunjung, namun dengan memberikan batasa pada harga sesuai dengan ketentuan yang tidak merugikan antara pengelola dan pengunjung. Namun peran Pemerintah Desa masih tergolong belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan retribusi, yang ini ditandai sebagai salah satu penghambat untuk pemasukan desa. Peran Pemerintah sebagai regulator ditandai sebagai salah satu peran yang cukup penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa, regulasi yang diberlakukan oleh Pemerintah akan mempengaruhi bagaimana sistem pengelolaan desa wisata berjalan, semakin adil dan transferan regulasi yang diambil oleh Pemerintah Desa maka semakin tinggi tingkat keberhasilan dari pengelolaan desa wisata.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2018) bahwa Pemerintah Desa memiliki peran sebagai fasilitator dan regulator dalam mewujudkan desa wisata, semakin tinggi peran yang diberikan oleh pemerintah terhadap perkembangan desa wisata maka semakin optimal pengelolaan desa wisata. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Habibi, (2022) menemukan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata

dipengaruhi oleh sinergi pemerintah desa melalui eksplorasi potensi dan masyarakat sebagai koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator. Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi penghasilan, pemukiman yang bersih, tingkat pendidikan, serta terpenuhinya fasilitas kesehatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung pada Desa Wisata Aek Buru Desa Batu Tunggal. Pertama faktor pendukung terbentuknya desa wisata ini meliputi karena adanya dukungan masyarakat, antusiasme masyarakat dalam mengembangkan desa wisata menjadi salah satu faktor pendukung yang cukup besar bagi desa untuk mengembangkan desa wisata, selanjutnya panorama alam yang terdapat di Desa Batu Tunggal juga mendukung jalannya desa wisata. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan oleh pengelola desa wisata dalam mengembangkan desa wisata adalah musim yang berubah, masalah lahan yang belum sepenuhnya milik pemerintah desa, promosi yang tidak optimal, keterbatasan anggaran dalam pengelolaan serta kondisi jalan yang buruk. Secara keseluruhan penelitian ini menemukan bahwa pendapatan asli desa yang diperoleh oleh Desa Batu Tunggal melalui pengembangan desa wisata masih cenderung sedikit. Pertama, minimnya promosi desa wisata menjadikan wisata Aek Buru kurang diminati oleh masyarakat, selanjutnya keterbatasan anggaran juga menyebabkan terhambatnya pengembangan desa wisata.

Menurut (Saputra, 2020) pengembangan Desa Wisata harus melibatkan kolaborasi antara *stakeholder* yang memiliki kepentingan agar pelaksanaannya tidak menghadapi tantangan atau gagal. Permasalahan dalam pengembangan desa wisata terjadi karena tidak ada kolaborasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat. Keberhasilan pengembangan desa wisata diukur dari pola pemberdayaan masyarakat. Proses pengembangan desa wisata melibatkan *policy creator* yaitu pemerintah sebagai pengambil keputusan, coordinator pengembangan wisata,fasilitator pengelolaan wisata, pelaksana kebijakan, dan akselerator program pengembangan wisata (Fahira, Umar & Habibi, 2022).

